



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 16 April 2016

Halaman: 9

ULP YOGYA KEMBALI JADI PERCONTOHAN

Pengadaan Barang Tidak Bisa 'Main Mata'

YOGYA (KR) - Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta kembali menjadi percontohan nasional. Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan sistem elektronik bakal semakin menutup celah oknum yang 'main mata' dalam menentukan pemenang lelang.

Sejak 2013 lalu, ULP Kota Yogyakarta mendapat pendampingan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selama dua bulan lalu, pengadaan barang dan jasa terus dilakukan modernisasi dari sisi perangkat. Kemudian pada Kamis (14/4) lalu di Jakarta, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman Program Modernisasi Pengadaan Fase II antara Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dengan Kepala LKPP Agus Prabowo.

"Pada 2013 lalu juga sudah dijadikan percontohan. Sekarang menapaki fase kedua. Kami menyampaikan apresiasi kepada LKPP yang tidak henti-hentinya memberikan arahan, bimbingan serta dorongan untuk modernisasi ULP Kota Yogya menjadi ULP percontohan," papar Haryadi, Jumat (15/4).

Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman tersebut mengandung arti jika Kota Yogyakarta turut diperhitungkan di tingkat nasional. Hal ini karena kegiatan ULP dikerjakan dengan profesional dan akuntabel, terutama pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Bahkan, sistem ULP Kota Yogya tidak hanya digunakan di internal pemkot, melainkan pihak lain seperti perguruan tinggi serta rumah sakit yang hendak melakukan pengadaan barang.

Kepala Pengendalian Pembangunan (Dalbang) Kota Yogyakarta, Wasesa mengungkapkan, sebagai konsekuensinya, ULP Kota Yogya akan menjadi model pengembangan bagi ULP lainnya. Menurutnya, ULP Kota Yogya dinilai memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu program yang ia gulirkan ialah membentuk kelompok kerja (pokja) induk dalam mengawasi LPSE.

"Misal terjadi persoalan dalam LPSE, pokja itu langsung menangani. Daftar tunggu pengadaan juga semakin cepat dan terukur. Bahkan kami optimis, ke depan tidak ada daftar tunggu," ungkapnya.

Wasesa juga tidak menampik, kegiatan pelelangan barang dan jasa pemerintah selalu rawan terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun melalui penguatan sistem, potensi pelanggaran bisa ditekan dengan sangat ketat. "Kami serius menggarap lembaga ULP secara mandiri. Sistem akan kami kuatkan untuk menghasilkan tata kelola yang bersih," terangnya. (Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembanguna	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005